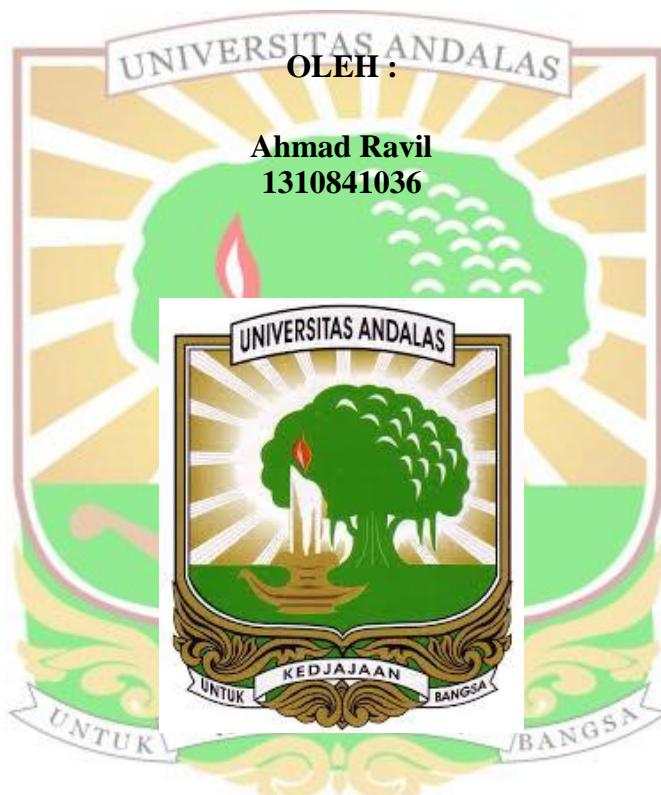


**PENGAWASAN PENGOPERASIAN TRANS PADANG
KORIDOR I**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

ABSTRAK

Ahmad Ravil, BP 1310841036, Pengawasan Pengoperasian Trans Padang Koridor I. Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2019. Dibimbing oleh : Rozidateno Putri Hanida, S.I.P, M.PA dan Misnar Sitriwanti S.A.P, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 168 halaman dengan referensi 13 buku teori, 3 buku metode, 3 skripsi, 2 jurnal, 7 peraturan perundang-undangan, dan 7 website.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan pengoperasian Trans Padang Koridor I yang berpedoman kepada Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Trans Padang. Trans Padang merupakan transportasi di Kota Padang yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Padang agar tercipta sistem transportasi berbasis angkutan massal. Pengawasan pengoperasian Trans Padang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Trans Padang sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Trans Padang. Teori yang digunakan adalah teori Soewarno Handayuningrat tentang metode-metode pengawasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan pengoperasian Trans Padang Koridor I tidak berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan terjadinya kecurangan dalam pendistribusian tiket Trans Padang ke penumpang, dan peralihan sistem pembayaran tarif Trans Padang dari uang tunai ke sistem pembayaran elektronik yang masih butuh penyesuaian, kemudian tidak terjalin koordinasi yang baik antara Unit Pelaksana Teknis dengan pelaksana atau operator Trans Padang, serta kendala yang dialami oleh Unit Pelaksana Teknis Trans Padang yang mengalami kekurangan personil pengawas yang tidak sebanding dengan luas cakupan wilayah operasional Trans Padang sehingga pengawasan pengoperasian Trans Padang masih lemah.

Kata Kunci : Pengawasan, Pengoperasian, Trans Padang Koridor I

ABSTRACT

Ahmad Ravil, BP 1310841036, Supervision of Trans Padang Corridor I Operations. Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2019. Supervised by: Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA and Misnar Sitriwanti S.AP , M.Si. This thesis consists of 168 pages with references to 13 theory books, 3 method books, 3 theses, 2 journals, 7 laws and regulations, and 7 websites.

The aim of this research is to describe how the supervision of the operation of Trans Padang Corridor 1 which is guided by the regulation of the Mayor of Padang No.21 of 2013 about mass transit service standards of Trans Padang. Trans Padang is a transportation in the city of Padang that is intended for the people of Padang city to create a transportation system based on mass transportation. The supervision of the operation of Trans Padang is carried out by the Trans Padang Technical Implementation Unit in accordance with the issuance of regulation for the Mayor of Padang No. 28 of 2013 about Trans Padang Technical Implementation Unit. The theory used is the theory by Soewarno Handayaningrat about supervision methods.

This research is using descriptive qualitative approach. Data collection techniques are observation, interview, and documentation. The data validity technique used is source triangulation. Informant selection technique is purposive sampling technique.

The results of the research stated that the operational supervision Trans Padang Corridor 1 was not going well. This is evidenced by the occurrence of fraud in the distribution of Trans Padang tickets to passengers, good coordination is not established between the Trans Padang Technical Implementation Unit and the Trans Padang Operator, as well as the obstacles experienced by the Trans Padang Technical Implementation Unit that is experiencing a shortage of supervisory personnel that is not comparable to the broad scope of the operational area of Trans Padang so that the supervision of Trans Padang operations is still weak.

Key words : Supervision, Operation, Trans Padang Corridor I